

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

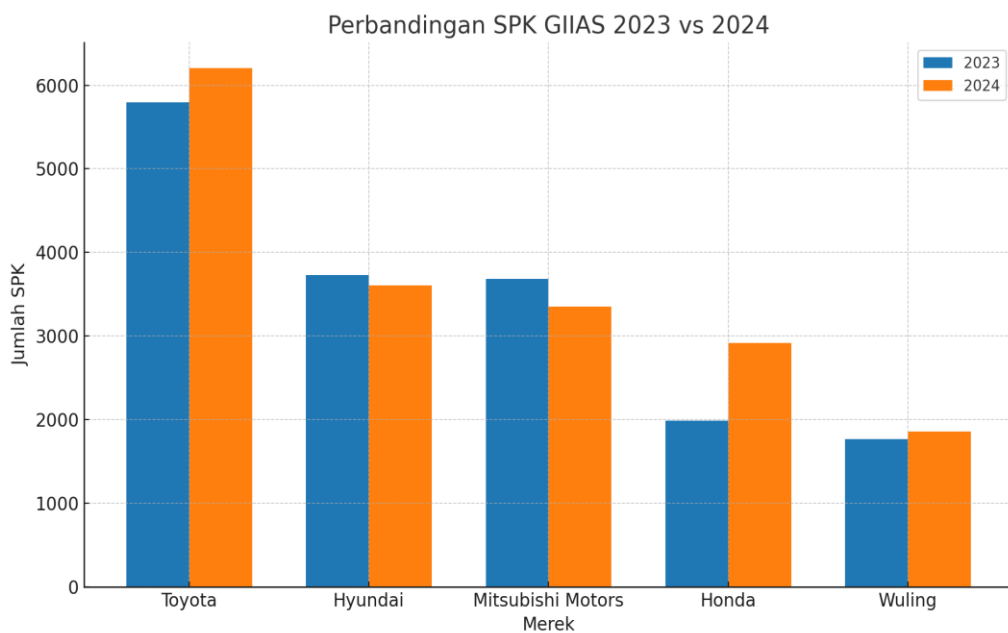
Merespons tekanan perubahan iklim dan meningkatnya kompetisi teknologi internasional, Tiongkok mengembangkan strategi industrial berbasis *standard-setting* melalui inisiatif *China Standards 2035*, kerangka kebijakan *Green Policy* jangka panjang yang bertujuan menempatkan Tiongkok sebagai pembentuk standar global dalam teknologi maju dan industri masa depan. Diluncurkan pada 2020 sebagai kelanjutan *Made in China 2025*, kebijakan ini mengintegrasikan inovasi teknologi, transisi energi hijau, dan ekspansi pengaruh geoekonomi dalam strategi pembangunan nasional terpadu (Seaman, 2020). *Green Policy* Tiongkok berperan sebagai instrumen kebijakan industri yang meningkatkan kapasitas produksi kendaraan listrik sekaligus mendorong ekspansi pasar internasional melalui peningkatan investasi riset energi terbarukan, penguatan rantai pasok *electric vehicle* (EV), serta diplomasi standardisasi industri yang dijalankan perusahaan seperti BYD dan CATL. Pada 2023, ekspor kendaraan listrik Tiongkok melampaui 1,2 juta unit, hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, menjadikan eksportir EV terbesar dunia (IEA, 2024).

Adopsi kebijakan *Green Policy* meningkatkan kompetisi ekonomi antarnegara dalam sektor kendaraan listrik (Nancy Wei, 2024). Dalam perspektif hubungan internasional, dinamika ini menunjukkan pergeseran distribusi kekuatan ekonomi global, di mana industri ramah lingkungan digunakan sebagai instrumen perluasan pengaruh politik dan ekonomi Tiongkok di kawasan.

Perkembangan industri mobil listrik global telah menciptakan arena baru persaingan geoekonomi antara Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan di Indonesia sebagai pasar strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah mengimplementasikan kebijakan standardisasi ekspor yang memungkinkan produsen seperti BYD dan Wuling untuk memasuki pasar Indonesia dengan harga yang sangat kompetitif, menantang dominasi historis produsen Jepang seperti Toyota dan Honda (Aditya Widiutomo, 2024). Korea Selatan turut menjadi aktor

penting dalam lanskap otomotif Asia, khususnya melalui perusahaan seperti Hyundai dan Kia. Negara ini menekankan pengembangan teknologi kendaraan listrik dan hidrogen, serta investasi langsung ke pasar Indonesia, seperti pembangunan pabrik dan pusat riset EV (Jung-Eun Shin, 2024).

Tabel 1.1 Perbandingan SPK GIIAS 2023 vs 2024

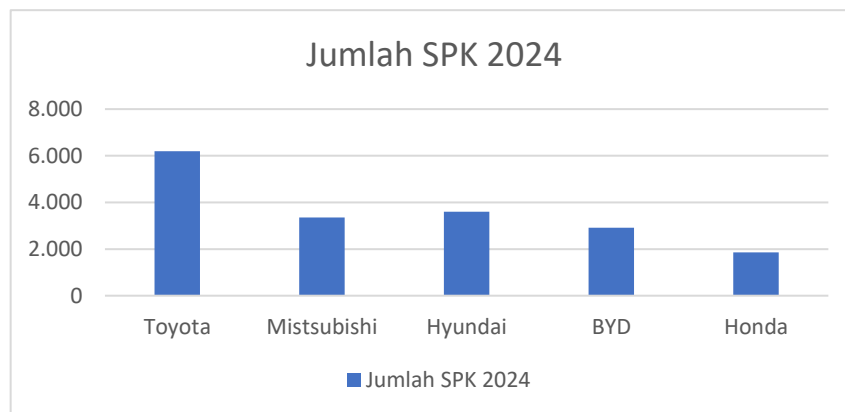


Sumber: Data penjualan GIIAS 2023

Tabel 1.1 menunjukkan persaingan industri otomotif dalam lanskap pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) menunjukkan pergeseran signifikan antara tahun 2023 dan 2024, terutama dalam hal konfigurasi aktor industri yang memperoleh eksposur pasar tertinggi melalui indikator Surat Pemesanan Kendaraan (SPK). Pada tahun 2023, dominasi penjualan masih dikuasai merek-merek konvensional yang berasal dari Jepang dan Korea Selatan dalam struktur industri otomotif Indonesia, seperti Toyota 5.796 unit, Hyundai 3.727 unit, Mitsubishi Motors 3.685 unit, dan Honda 1.992 unit. Dalam konfigurasi tersebut, tidak ditemukan kehadiran BYD sebagai aktor yang signifikan karena BYD secara resmi memasuki pasar otomotif Indonesia pada tanggal 18 Januari 2024. Sedangkan Wuling merek asal Tiongkok yang memiliki segmentasi pasar menengah berhasil

mencatatkan 1.771 unit, menempatkannya di bawah Honda namun di atas beberapa merek mapan lain seperti Suzuki dan Daihatsu (M Syakur Usman, 2023).

Tabel 1.2 Jumlah SPK 2024



Sumber: Data SPK GIIAS 2024

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terjadi perubahan signifikan dalam komposisi aktor industri otomotif yang mencerminkan implementasi *Green Policy* Tiongkok secara lebih konkret. Hal ini ditunjukkan melalui penetrasi pasar oleh BYD yang berhasil mencatatkan SPK minggu ke 4 sebesar 2.920 unit, menempatkannya di peringkat keempat secara nasional, melampaui Honda yang mencatatkan 1.861 unit, dan mendekati posisi Hyundai 3.606 unit serta Mitsubishi 3.353 unit, Toyota tetap memimpin 6.202 unit. Kenaikan ini terjadi bersamaan dengan absennya Wuling dari lima besar, yang sebelumnya menjadi perwakilan dominan Tiongkok dalam segmen pasar menengah (Aditya Widiutomo, 2024). Pergeseran ini merepresentasikan reposisi strategi geoekonomi Tiongkok, di mana korporasi yang lebih kompetitif secara teknologi dan efisiensi produksi difungsikan sebagai ujung tombak kebijakan industri luar negerinya. Pencapaian BYD tidak hanya menandai keberhasilan penetrasi pasar, tetapi juga memperlihatkan keberfungsian *Green Policy* sebagai perangkat diplomasi ekonomi yang terintegrasi dengan insentif fiskal, kerja sama bilateral, serta perubahan preferensi konsumen terhadap kendaraan rendah emisi. Pergantian posisi Wuling oleh BYD menunjukkan adanya seleksi strategis internal dalam ekosistem industri otomotif

Tiongkok yang diarahkan pada penguatan daya saing global melalui pendekatan yang lebih terstandar dan terintegrasi.

Melalui kombinasi dukungan pemerintah, subsidi ekspor, dan integrasi vertikal dalam produksi baterai lithium, sangat memungkinkan untuk Tiongkok mengembangkan keunggulan kompetitif yang membuat penetrasi pasar Indonesia dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan produsen Jepang. Lebih dari sekadar strategi komersial, pendekatan ini mencerminkan apa yang oleh para ahli hubungan internasional disebut sebagai "*economic statecraft*" penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan politik strategis (Baldwin, 2020). Melalui ekspor mobil listrik, Tiongkok tidak hanya memperluas pangsa pasarnya, tetapi juga mempromosikan standar teknologi dan pengaruh regulasinya di kawasan, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi geopolitiknya.

Di sisi lain, Jepang yang merupakan mitra dagang tradisional Indonesia sejak era 1970-an, merespons fenomena ini melalui pendekatan diplomasi ekonomi yang berbeda. Jepang memprioritaskan pengembangan teknologi hibrida sebagai jalan tengah transisi energi yang lebih sesuai dengan infrastruktur negara berkembang seperti Indonesia (Ahman, 2006).

Jepang berupaya mengimbangi pengaruh BRI Tiongkok melalui inisiatif "*Free and Open Indo-Pacific*" (FOIP) yang mencakup kerja sama ekonomi dan teknologi dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Kucharski, 2020). Melalui FOIP, Jepang menawarkan pendekatan alternatif untuk pengembangan infrastruktur dan industrialisasi yang menekankan pada transparansi, keberlanjutan, dan pembangunan kapasitas lokal yang lebih substantif. Dalam konteks industri mobil listrik, strategi ini diterjemahkan ke dalam investasi jangka panjang pada penelitian dan pengembangan bersama, serta transfer teknologi yang lebih menyeluruh dibandingkan pendekatan Tiongkok yang lebih berorientasi pada penguasaan pasar (Koga, 2019). Di sektor EV, Jepang memperkuat kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2023, Jepang dan Indonesia menandatangani nota kesepahaman untuk mempercepat transisi energi, dengan fokus pada investasi EV dan transfer teknologi. Perusahaan Jepang seperti Toyota dan Mitsubishi telah berinvestasi

dalam riset dan pengembangan bersama serta membangun fasilitas produksi EV di Indonesia (Ferry Sandi, 2022). Jepang menekankan pada kolaborasi jangka panjang, transfer teknologi, dan pembangunan kapasitas lokal, memberikan alternatif yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi negara-negara mitra di Asia Tenggara.

Korea Selatan muncul sebagai aktor ketiga dalam persaingan ini melalui strategi hybrid antara model Tiongkok dan Jepang. Produsen seperti Hyundai-Kia memanfaatkan *technology licensing* dari Tiongkok untuk baterai sambil mempertahankan keunggulan desain global mereka (CATL, 2024). menunjukkan investasi Korea di Indonesia mencapai USD 2.1 miliar untuk pabrik baterai dan kendaraan listrik, bersaing langsung dengan Tiongkok melalui skema *local content requirement* 40% (Setneg RI, 2024).

Dinamika persaingan ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam arsitektur ekonomi-politik regional Asia Tenggara (Kementerian Investasi, 2024). Sebagai anggota ASEAN dengan ekonomi terbesar dan pasar otomotif terpenting di kawasan, posisi Indonesia dalam persaingan mobil listrik Tiongkok-Jepang memiliki implikasi signifikan bagi perkembangan integrasi ekonomi regional. Bagaimana Indonesia menavigasi persaingan ini akan mempengaruhi tidak hanya arah kebijakan industri otomotifnya sendiri, tetapi juga dinamika kerja sama ekonomi dan standarisasi teknis di tingkat ASEAN. Posisi Indonesia yang kuat dalam organisasi regional memberikannya potensi untuk menjadi "norm entrepreneur" yang dapat mempengaruhi arah kebijakan mobilitas listrik di kawasan (Acharya, 2011).

Penelitian ini menganalisis bagaimana *Green Policy* Tiongkok dan standarisasi ekspor mobil listriknya berdampak pada hubungan ekonomi-politik Indonesia-Tiongkok-Jepang, serta implikasinya terhadap kebijakan industri otomotif nasional Indonesia. Melalui perspektif hubungan internasional, penelitian ini menjelaskan bagaimana dinamika persaingan ini mencerminkan pergeseran kekuatan ekonomi regional dan global, serta bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan persaingan ini untuk memperkuat posisi diplomasi ekonominya dan mengakselerasi transisi menuju industri transportasi yang lebih berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang dapat membimbing arah kajian ini, yaitu:

Bagaimana dampak implementasi *Green Policy* Tiongkok terhadap persaingan geoekonomi industri otomotif dan kebijakan industri otomotif di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana kebijakan *Green Policy* Tiongkok mempengaruhi konfigurasi persaingan geoekonomi otomotif di pasar Indonesia.
2. Mengidentifikasi strategi diplomasi ekonomi Tiongkok dalam persaingan mobil listrik di Indonesia.
3. Mengidentifikasi dinamika persaingan antar perusahaan otomotif utama dari Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok di pasar kendaraan listrik Indonesia.
4. Menelaah dampak persaingan geoekonomi Tiongkok terhadap kebijakan industri otomotif nasional Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademik

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian hubungan internasional, khususnya dalam bidang geoekonomi dan diplomasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara, dengan menganalisis dampak kebijakan *Green Policy* Tiongkok terhadap dinamika persaingan industri otomotif di Indonesia. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan epistemologis bagi mahasiswa dan peneliti yang menelaah isu transisi energi, transformasi industri otomotif, diplomasi ekonomi, pembangunan berkelanjutan, serta politik industri strategis di negara berkembang. Melalui pendekatan analitis yang bertumpu pada perspektif neomerkantilisme dan geoekonomi, studi ini juga diharapkan menjadi referensi awal dalam pengembangan kerangka konseptual untuk memahami pola

interdependensi ekonomi-politik antara negara-negara besar dan negara periferal dalam konteks perubahan struktur ekonomi global pada era transisi energi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam merumuskan strategi respons yang lebih adaptif terhadap meningkatnya kehadiran produsen kendaraan listrik asing, khususnya dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan dinamika persaingan antarnegara tersebut guna memperkuat daya saing industri otomotif nasional, meningkatkan kapasitas teknologi domestik, serta mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Persaingan geoekonomi antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dalam industri otomotif Indonesia merepresentasikan bentuk kontestasi kekuasaan ekonomi yang semakin menonjol dalam lanskap hubungan internasional kontemporer. Dalam konteks ini, kebijakan *Green Policy* Tiongkok terutama dalam bentuk ekspansi kendaraan listrik tidak sekadar dipahami sebagai instrumen transisi energi, melainkan sebagai alat strategis negara dalam memperluas pengaruh geoekonomi di kawasan. Fenomena tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dalam studi hubungan internasional, di mana sektor-sektor non-tradisional seperti ekonomi dan teknologi kini menjadi arena utama dalam pertarungan kepentingan negara.

Beberapa kajian terdahulu telah menyoroti rivalitas antara Tiongkok dan Jepang di Indonesia. Adelia Rahmawati (2022) mengkaji dinamika hubungan antara Tiongkok dan Jepang hampir selalu melihat Jepang sebagai pesaing utama Tiongkok di Asia Tenggara atau seringkali juga dijuluki sebagai *Sino-Japanese Rivalry*. Meskipun relevan, studi ini belum mengaitkan dinamika tersebut dengan penggunaan *Green Policy* sebagai instrumen ekspansi geoekonomi Tiongkok ke Asia Tenggara.

Di sisi lain, Valentina (2019) meneliti pendekatan Jepang dan Tiongkok melalui perdagangan dan investasi asing di Asia Tenggara. Jepang dan Tiongkok terlibat dalam rivalitas ekonomi di Indonesia, khususnya di sektor perdagangan dan investasi, yang ditunjukkan melalui keterlibatan dalam perjanjian ekonomi, investasi infrastruktur, serta proyek-proyek kompetitif yang salah satu pembahasannya di dalamnya terdapat aspek otomotif. Dengan menggunakan konsep interstate rivalry dari Paul R. Hensel, penelitian ini menunjukkan bahwa kedua negara saling bersaing untuk kepentingan strategis di Indonesia, saling memandang sebagai ancaman, dan rivalitas ini berlangsung dalam periode waktu tertentu serta berpotensi berlanjut. Namun, kajian ini belum mengelaborasi lebih lanjut aspek strategis dari instrumen *Green Policy* sebagai bagian dari kontestasi kekuasaan khususnya di Indonesia dengan fokus mobil listrik.

Dilanjutkan dengan kajian Luthfiah & Rahmat (2025) yang membahas Kerja sama strategis Indonesia–Korea Selatan dalam bidang otomotif, khususnya pengembangan mobil listrik, diwujudkan melalui pendekatan *government to government (G2G)*, *government to business (G2B)*, dan *business to business (B2B)*. Menyoroti keberhasilan fase awal investasi Hyundai dan LG dalam pembangunan pabrik mobil listrik dan baterai di Bekasi dan Karawang sebagai hasil konkret dari kerja sama ini. Namun, kajian tersebut cenderung bersifat deskriptif dalam konteks pembangunan industri domestik Indonesia-Korea. Belum menempatkan kerja sama ini dalam lanskap yang lebih luas, yakni dalam konteks persaingan geoekonomi antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan di pasar otomotif Indonesia. Terlebih lagi, belum dianalisis bagaimana kebijakan *Green Policy* Tiongkok menjadi instrumen neomerkantilisme yang mempengaruhi arah investasi dan dominasi teknologinya di kawasan.

Kajian oleh Axsen & Kurani (2013) menunjukkan bahwa konsumen mobil baru menunjukkan minat tinggi terhadap kendaraan listrik jenis *Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)* yang menggunakan sistem "*blended*" (gabungan listrik dan bensin). Namun demikian, kajian tersebut lebih menitikberatkan pada perilaku konsumen di negara maju, terutama Amerika Serikat dan Kanada, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan konteks geoekonomi negara berkembang

seperti Indonesia. Selain itu, studi tersebut belum mengelaborasi bagaimana *Green Policy* suatu negara (dalam hal ini Tiongkok) digunakan sebagai alat ekspansi geoekonomi melalui dominasi pasar kendaraan listrik, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Sementara itu, Setyoko et., al (2022) menjelaskan kebijakan transportasi rendah emisi mendorong percepatan adopsi EV di Indonesia guna menurunkan emisi gas rumah kaca dan konsumsi energi fosil. Sebagai pasar otomotif terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki prospek signifikan dalam pengembangan EV, Yang memberikan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat peningkatan penjualan EV dari 687 unit (2020) menjadi 3.193 unit (2021) dan 15.437 unit (2022), menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Namun, penelitian tersebut tidak menelaah bagaimana kebijakan negara terhadap kendaraan listrik dan transisi energi dipengaruhi oleh tarik-menarik kekuatan geoekonomi antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan di pasar domestik.

Secara umum, tinjauan terhadap literatur yang ada memperlihatkan bahwa meskipun telah banyak studi mengenai rivalitas strategis antara Tiongkok, Jepang serta Korea Selatan di Indonesia, sebagian besar masih berfokus pada isu-isu konvensional seperti infrastruktur, bantuan luar negeri, dan keamanan maritim. Belum banyak kajian yang secara eksplisit membahas kontestasi geoekonomi dalam industri otomotif melalui lensa hubungan internasional, khususnya dalam konteks transformasi global menuju *Green Policy*.

Lebih jauh, masih sedikit studi yang menggabungkan secara komprehensif perspektif neomerkantilisme dengan pendekatan geoekonomi untuk menganalisis bagaimana *Green Policy* Tiongkok menjadi instrumen strategis dalam persaingan pengaruh di sektor otomotif Indonesia. Padahal, fenomena ini mencerminkan reorientasi strategi kekuatan besar dalam sistem internasional pasca-Perang Dingin, di mana batas antara *high politics* dan *low politics* menjadi semakin kabur. Negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan kini menggunakan keunggulan teknologi, pendanaan hijau, dan penetrasi industri sebagai alat politik luar negeri untuk mengamankan kepentingan strategis mereka di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan literatur dengan mengintegrasikan pendekatan hubungan internasional kritis

melalui teori neomerkantilisme untuk menjelaskan bagaimana kebijakan *Green Policy* Tiongkok menjadi instrumen pembentukan pengaruh dalam persaingan geoekonomi dengan Jepang dan Korea Selatan di pasar otomotif Indonesia.

Dalam kerangka *neomerkantilisme*, negara diposisikan sebagai aktor utama yang rasional dan strategis dalam mengintervensi pasar demi memastikan akumulasi kekuatan ekonomi nasional. Pandangan ini berakar pada teori-teori realis dan telah dikembangkan lebih lanjut oleh penulis seperti R. Gilpin (2001) yang menekankan bahwa negara cenderung menggunakan kebijakan proteksionis, dukungan industri domestik, serta manipulasi regulasi guna mempertahankan daya saing strategisnya di pasar global. Dalam konteks Tiongkok, kebijakan *Green Policy* tidak dapat dilepaskan dari peran aktif negara dalam menyusun *industrial policy* yang terencana, meliputi subsidi besar-besaran untuk perusahaan seperti BYD, perlindungan atas pasar domestik, serta diplomasi teknologi dan lingkungan sebagai bagian dari ekspansi pengaruh global. Oleh karena itu, intervensi negara dalam mendukung internasionalisasi sektor EV Tiongkok merupakan refleksi dari praktik neomerkantilisme, yang juga menimbulkan persoalan bagi negara-negara seperti Indonesia yang dihadapkan pada pilihan antara membuka diri terhadap investasi asing dan menjaga otonomi ekonomi nasional.

Fenomena ini sangat nyata dalam strategi industrialisasi Tiongkok, terutama dalam kerangka *Green Policy* yang terintegrasi dalam transformasi sistemik sektor EV. Pemerintah Tiongkok telah mendesain kebijakan fiskal yang mendukung penuh korporasi nasional seperti BYD dan NIO melalui alokasi subsidi sebesar 50 miliar RMB pada tahun 2022 untuk mempercepat penetrasi kendaraan listrik di pasar domestik dan global (Frank Bickenbach et al., 2024). Di bawah kontrol negara, kebijakan ini juga mencakup proteksi pasar domestik, insentif ekspor, dan diplomasi lingkungan yang diselaraskan dengan proyek geoekonomi jangka panjang seperti *China Standards 2035*, yang menggantikan narasi industrial sebelumnya yakni *Made in China 2025* (Yi Wu, 2022). Dalam hal ini, kendaraan listrik bukan sekadar produk teknologi, melainkan instrumen hegemonik dalam strategi perluasan pengaruh Tiongkok secara global melalui kendaraan regulasi, modal, dan teknologi hijau (Scott Kennedy, 2024).

Implikasi logika neomerkantilisme ini semakin terasa ketika menelusuri jejak ekspansi Tiongkok ke pasar Indonesia. Lewat investasi langsung luar negeri (FDI), Tiongkok mengonsolidasikan dominasi nilai tambah dalam rantai pasok baterai EV, antara lain dengan membangun fasilitas pengolahan nikel di Morowali, Sulawesi, yang merupakan bahan baku strategis dalam transisi energi (Warburton, 2024). Selain itu, perusahaan milik negara seperti CATL dan BYD tidak hanya difungsikan sebagai instrumen ekonomi, melainkan juga sebagai proyeksi kekuatan negara di luar negeri. Pemerintah Tiongkok secara aktif mendukung penetrasi pasar perusahaan-perusahaan tersebut ke Indonesia, menciptakan lanskap kompetisi yang asimetris dan menantang otonomi ekonomi negara tuan rumah. Dengan demikian, intervensi negara Tiongkok dalam industri EV tidak dapat dipahami semata sebagai kebijakan pembangunan, tetapi juga sebagai ekspresi kontemporer dari neomerkantilisme yang berkonsekuensi langsung terhadap dinamika geopolitik dan geoekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Meskipun penelitian ini berfokus pada Indonesia sebagai pasar otomotif yang menerima investasi kendaraan listrik, arah analisisnya tetap berfokus pada struktural yang dibangun oleh kebijakan ekonomi Tiongkok. Dalam hal ini, Indonesia diposisikan bukan sebagai aktor utama, namun sebagai arena geoekonomi, tempat kebijakan negara besar diwujudkan dalam bentuk penetrasi pasar, transfer teknologi, dan restrukturisasi rantai nilai industri. Pandangan ini sejalan dengan kerangka pemikiran Robert Gilpin, yang menegaskan bahwa struktur ekonomi negara berkembang umumnya mencerminkan tatanan kekuasaan global yang lebih luas (R. G. Gilpin, 2016).

1.6 Operasional Konsep

1.6.1 Kerangka Konseptual

1.6.1.1 *Green Policy*

Green Policy Tiongkok adalah bagian dari strategi negara untuk bertransisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan agenda global untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Dalam upaya tersebut, Tiongkok

mengintegrasikan *Green Policy* dalam berbagai sektor, termasuk industri otomotif, energi terbarukan, dan teknologi bersih. Salah satu manifestasi utama dari kebijakan ini adalah rencana untuk mendominasi pasar EV, yang sejalan dengan upaya negara untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan inovasi dalam sektor teknologi hijau (Yi Wu, 2022). Kebijakan ini berfokus pada pengurangan emisi karbon, peningkatan efisiensi energi, dan adopsi teknologi bersih dalam kehidupan sehari-hari.

Tiongkok secara resmi menggantikan "*Made in China 2025*" dengan "*China Standards 2035*", sebagai bagian dari transisi yang lebih ambisius menuju pengembangan standar global yang berorientasi pada keberlanjutan. "*China Standards 2035*" bertujuan untuk menetapkan standar industri di berbagai sektor, termasuk kendaraan listrik, baterai, dan teknologi hijau lainnya, untuk memperkuat posisi Tiongkok sebagai pemimpin global dalam industri-industri berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya mencakup produksi domestik, tetapi juga ekspansi internasional melalui kebijakan ekspor dan aliansi strategis (Yi Wu, 2022).

Sebelumnya, "*Made in China 2025*" mengutamakan pengembangan sektor-sektor teknologi tinggi seperti robotika, kecerdasan buatan, dan kendaraan listrik, namun dengan fokus yang lebih besar pada penguatan kapasitas produksi dalam negeri. "*China Standards 2035*" menggantikan fokus tersebut dengan menekankan pengembangan standar internasional untuk teknologi hijau, yang memungkinkan Tiongkok untuk mendominasi pasar global dalam sektor yang lebih ramah lingkungan (Yi Wu, 2022). Ini juga mencerminkan perubahan dalam strategi industri Tiongkok, di mana negara ini semakin menekankan inovasi yang berkelanjutan dan tidak hanya pada peningkatan produksi.

Dengan kebijakan ini, Tiongkok berusaha mengintegrasikan sektor otomotif, khususnya kendaraan listrik, dalam kerangka *Green Policy* yang lebih luas. Ini melibatkan pengembangan infrastruktur yang mendukung kendaraan listrik, termasuk stasiun pengisian baterai, dan peningkatan kapasitas produksi serta kualitas kendaraan listrik untuk memenuhi standar global yang ditetapkan dalam "*China Standards 2035*". Dalam hal ini, *Green Policy* Tiongkok dapat dipahami sebagai alat strategis untuk memperkuat pengaruh ekonomi-politik negara ini di

tingkat global, serta sebagai langkah untuk mendominasi pasar kendaraan listrik di pasar internasional, termasuk Indonesia (ICCT, 2021).

1.6.1.2 Geoekonomi

Geoekonomi sebagai sebuah konsep dan pendekatan dalam hubungan internasional berkembang sebagai respons terhadap dinamika global pasca-Perang Dingin. Istilah geoekonomi pertama kali dipopulerkan oleh Luttwak (1990) dalam karya awalnya "*From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce*". Luttwak berpendapat bahwa, meskipun negara-negara terus berhadapan dengan persaingan geopolitik, logika kekuatan negara kini lebih banyak diekspresikan melalui perdagangan, investasi, dan aliansi ekonomi daripada melalui perang konvensional. Dalam pemikirannya, geoekonomi mengandung logika ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik, yang merupakan pergeseran dari penggunaan kekuatan militer langsung ke instrumen ekonomi untuk memperluas pengaruh dan kepentingan nasional.

Luttwak menggambarkan geoekonomi sebagai "*the logic of war in the grammar of commerce,*" yang berarti bahwa negara menggunakan instrumen ekonomi dengan cara yang mirip dengan strategi militer. Dalam hal ini, perdagangan internasional, investasi asing, dan kendali atas teknologi adalah medan pertarungan negara-negara untuk mendominasi atau mempengaruhi tatanan internasional. Geoekonomi berfokus pada bagaimana negara menggunakan ekonomi sebagai alat untuk meraih tujuan strategis dalam hubungan internasional, terutama dalam persaingan untuk mengendalikan sumber daya penting dan pasar global.

Seiring berjalannya waktu, konsep geoekonomi berkembang lebih jauh, dengan pemikir-pemikir lain seperti Kaplan (2009) yang menghubungkannya dengan globalisasi dan interdependensi ekonomi yang semakin erat. Kaplan menyoroti bahwa dalam dunia yang semakin terhubung, persaingan global bukan hanya mengenai penguasaan wilayah fisik, melainkan penguasaan aliran ekonomi, seperti energi, teknologi, dan pasar yang berkembang. Negara-negara yang

memiliki kontrol atas sektor-sektor strategis ini bisa mengamankan posisi tawar mereka dalam politik global.

Dalam geoekonomi, negara bukan hanya berperan sebagai aktor pasar yang memanfaatkan pasar global, tetapi lebih sebagai aktor yang aktif membentuk pasar dan struktur ekonomi untuk memajukan kepentingan strategis mereka. Oleh karena itu, geoekonomi berfokus pada penggunaan kebijakan ekonomi yang tidak hanya bertujuan untuk kesejahteraan domestik tetapi juga untuk memperkuat posisi geopolitik dan geoekonomi negara di dunia internasional (Blackwill & Harris, 2016).

1.6.1.3 *Power Transition*

Konsep *power transition* berakar dari tradisi realisme struktural dalam kajian hubungan internasional, khususnya sebagai elaborasi terhadap dinamika sistemik dalam distribusi kekuasaan global. Konseptualisasi awal mengenai transisi kekuatan ini dikembangkan oleh A. F. K. Organski dalam magnum opus-nya *World Politics* (1958), yang menyatakan bahwa konflik besar dalam sistem internasional kerap kali dipicu oleh ketidakseimbangan antara negara status quo dengan negara yang tengah mengalami peningkatan kapabilitas kekuatan secara drastis. Organski kemudian mengembangkan gagasannya secara lebih sistematis bersama Jacek Kugler dalam *The War Ledger* (1980), yang menekankan pentingnya analisis perubahan kapabilitas relatif negara, khususnya dalam konteks ekonomi dan militer, sebagai prediktor utama instabilitas sistemik. Dalam kerangka ini, *power transition* dipahami bukan sebagai suatu momen tunggal, melainkan sebagai proses bertahap yang melibatkan transformasi dalam struktur kepemimpinan global, reorganisasi sistem aliansi, serta redefinisi norma dan institusi internasional.

Secara konseptual, *power transition* memiliki tiga dimensi utama. pertama, redistribusi kekuatan material antaraktor negara, yang diukur melalui peningkatan output ekonomi, inovasi teknologi, dan proyeksi strategis. kedua, ketimpangan antara kepuasan terhadap status quo dan kemampuan untuk mengubahnya, di mana negara yang tidak puas (*dissatisfied power*) cenderung merevisi tatanan yang ada dan ketiga, mekanisme adaptasi atau resistensi negara mapan terhadap negara

penantang, yang menciptakan dinamika kompetisi maupun koeksistensi struktural (Tammen et al., 2017). *Power transition* bukan hanya mencerminkan pergeseran kuantitatif kekuatan, melainkan juga transformasi kualitatif terhadap struktur pengaruh dan norma internasional.

Dalam konteks geoekonomi kontemporer, pendekatan *power transition* mengalami perluasan aplikatif, tidak lagi terbatas pada ranah militer konvensional, tetapi mencakup pula persaingan dalam bidang ekonomi strategis, seperti teknologi hijau, energi terbarukan, dan kendaraan listrik. Hal ini disoroti oleh Paul (2018) dalam artikulasinya mengenai *soft balancing*, yang menunjukkan bahwa negara penantang cenderung menggunakan instrumen ekonomi dan institusional untuk mengubah arsitektur kekuasaan global secara non-konfrontatif (Paul, 2018).

Dengan menempatkan *power transition* sebagai kerangka konseptual, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa kebangkitan Tiongkok dalam sektor otomotif bukan semata-mata fenomena ekonomi, melainkan bagian integral dari rekonstruksi kekuatan regional dan transformasi tatanan geoekonomi Asia Timur dan Asia Tenggara. Dominasi industri otomotif tidak lagi dapat dilepaskan dari kalkulasi kekuasaan, dan dalam konteks ini, *power transition* menjadi lensa teoretik yang menawarkan pemahaman mendalam terhadap relasi kompleks antara kebijakan domestik, strategi ekspansi industri, dan implikasi struktur kekuasaan regional.

1.6.2 Operasional Konseptual

1.6.2.1 *Green Policy*

Komitmen terhadap pembangunan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan dimensi praksis dari kebijakan tersebut (Aditya Putra Perdana, 2024). Pemberian subsidi dan insentif fiskal yang bersifat transnasional, yang tidak hanya difokuskan pada konsumsi domestik Tiongkok, tetapi juga diperluas ke kawasan mitra strategis melalui kerja sama bilateral dan produksi lokal bersama. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, turut mereformulasi kerangka kebijakannya dengan memberikan insentif kepada konsumen sekaligus produsen kendaraan listrik, yang mayoritas berasal dari atau bermitra dengan entitas

Tiongkok, guna menstimulasi produksi kendaraan ramah lingkungan yang lebih ekonomis dan kompetitif secara harga. Kombinasi antara dominasi standar teknologis, infrastruktur strategis, dan instrumen fiskal transnasional ini menjadikan *Green Policy* Tiongkok bukan hanya sebagai agenda domestik, melainkan sebagai proyek geoekonomi yang ditujukan untuk menata ulang tatanan industri global melalui kendaraan listrik sebagai medium utama ekspansi pengaruhnya.

1.6.2.2 Geoekonomi

Sebagai implementasi eksternal dari *Green Policy* Tiongkok, strategi geoekonomi diwujudkan melalui ekspansi investasi, integrasi rantai pasok, dan penetrasi kendaraan listrik di Indonesia. Implementasi geoekonomi terlihat melalui peningkatan pasar EV Indonesia dan investasi langsung pada industri kendaraan listrik, pembangunan fasilitas produksi baterai, serta integrasi rantai pasok yang melibatkan perusahaan Tiongkok di kawasan industri seperti Karawang dan Morowali. Kehadiran perusahaan seperti BYD dan CATL, Implementasi geoekonomi ini berdampak pada transformasi struktur pasar otomotif Indonesia dan integrasi teknologi Tiongkok ke dalam ekosistem produksi nasional (Indonesia Business Post, 2023).

Proyek fabrikasi baterai di Morowali oleh entitas seperti CATL merepresentasikan penciptaan ekosistem industri vertikal yang terintegrasi. Yang menandai peningkatan ketergantungan struktural Indonesia terhadap modal, teknologi, dan kendali operasional aktor Tiongkok (Warburton, 2024). Arsitektur kerja sama tersebut merupakan bagian integral dari kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI), yang mengintegrasikan agenda ekspansi infrastruktur fisik dengan sektor teknologi hijau dan otomotif listrik sebagai instrumen rekayasa pengaruh regional. Melalui mekanisme BRI, Tiongkok memfasilitasi aliran investasi yang diarahkan untuk memperkuat dominasi struktural atas pasar strategis Indonesia. Kondisi ini menempatkan industri kendaraan listrik sebagai arena kontestasi hegemoni baru dalam lanskap geopolitik Asia Tenggara (M. Li, 2020)

1.6.2.3 *Power Transition*

Praktik geoekonomi selanjutnya menghasilkan perubahan struktur kompetisi industri otomotif Indonesia yang mencerminkan proses *power transition* antara Jepang sebagai kekuatan mapan dan Tiongkok sebagai kekuatan penantang. Terjadinya peralihan dominasi struktural antara Jepang sebagai kekuatan mapan dengan Tiongkok sebagai kekuatan penantang yang tengah mengalami akselerasi. Salah satu indikator utamanya adalah erosi pangsa pasar oleh aktor dominan lama, yakni Jepang, yang terlihat dari berkurangnya dominasi merek seperti Honda, dan Daihatsu sejak 2022, bersamaan dengan ekspansi agresif perusahaan-perusahaan otomotif Tiongkok seperti Wuling dan BYD (M Syakur Usman, 2023). Transformasi ini bukan sekadar fenomena pasar, melainkan cerminan dari perubahan konstelasi kekuatan dalam sektor strategis yang mencerminkan redistribusi *power* pada tataran struktural.

Pergeseran ini juga termanifestasi melalui integrasi vertikal Indonesia ke dalam rantai pasok industri kendaraan listrik berbasis baterai yang secara dominan dikendalikan oleh Tiongkok. Pembangunan fasilitas produksi di Morowali dan Karawang yang melibatkan entitas seperti CATL menunjukkan bahwa transisi kekuatan juga terjadi dalam dimensi teknologi dan dependensi manufaktur (Warburton, 2024). *Power transition* dalam penelitian ini dipahami sebagai konsekuensi struktural dari implementasi *Green Policy* melalui mekanisme geoekonomi kendaraan listrik.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa *Green Policy* Tiongkok berfungsi sebagai instrumen geoekonomi negara yang secara kausal mendorong pergeseran struktur persaingan otomotif di Indonesia dari dominasi Jepang menuju peningkatan pengaruh industri kendaraan listrik Tiongkok. Melalui intervensi negara berupa subsidi industri, dukungan teknologi, penguasaan rantai pasok baterai, serta ekspansi investasi luar negeri, pemerintah Tiongkok menciptakan keunggulan biaya dan kapasitas produksi yang menghasilkan tekanan kompetitif terhadap produsen

otomotif tradisional. Dalam kerangka ekonomi-politik internasional Robert Gilpin, strategi tersebut merefleksikan penggunaan kekuatan ekonomi sebagai sarana akumulasi power negara dalam proses perubahan hierarki industri global (R. Gilpin, 2001).

Mekanisme kausal berlangsung melalui tiga tahap utama. Pertama, *Green Policy* domestik memperkuat *industrial capacity* kendaraan listrik Tiongkok melalui proteksi industri dan skala produksi besar. Kedua, kapasitas tersebut diekspansikan secara eksternal melalui investasi langsung, integrasi rantai pasok baterai, dan diplomasi ekonomi di negara berkembang yang memiliki sumber daya strategis. Ketiga, masuknya investasi dan produk kendaraan listrik Tiongkok ke Indonesia menurunkan hambatan harga serta meningkatkan ketergantungan teknologi dan industri pada ekosistem produksi Tiongkok. Proses ini menghasilkan restrukturisasi pasar otomotif nasional sekaligus mengubah posisi tawar Indonesia dalam rantai nilai global.

Pergeseran dominasi otomotif di Indonesia bukan semata akibat dinamika pasar, melainkan konsekuensi dari strategi geoekonomi negara sebagaimana dijelaskan oleh Edward Luttwak dan konsep *economic statecraft* Baldwin, di mana instrumen ekonomi digunakan secara sistematis untuk memperluas pengaruh politik dan membentuk struktur ketergantungan baru dalam ekonomi internasional.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif-eksplanatif dengan pendekatan analisis kebijakan dalam kerangka ekonomi politik internasional. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memetakan fenomena empiris masuknya dan berkembangnya kendaraan listrik asal Tiongkok di pasar Indonesia, termasuk dinamika kebijakan industri, insentif negara, serta perubahan struktur pasar otomotif nasional pada periode 2022–2024. Melalui tahap ini, penelitian berupaya menggambarkan konfigurasi aktor, kebijakan, serta perkembangan pasar secara sistematis dan berbasis data empiris.

Pendekatan eksplanatif digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara implementasi *Green Policy* Tiongkok dengan perubahan pola persaingan geoekonomi di sektor otomotif Indonesia. Analisis eksplanatif berfungsi mengidentifikasi bagaimana kebijakan industri dan strategi negara menghasilkan implikasi struktural terhadap kompetisi pasar, distribusi keunggulan ekonomi, serta posisi Indonesia dalam rantai nilai kendaraan listrik global.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi terbatas lapangan. Objek penelitian mencakup kebijakan *Green Policy* Tiongkok, dinamika investasi kendaraan listrik, serta struktur persaingan geoekonomi otomotif di pasar Indonesia. Lokasi pengamatan berada pada tataran lokal, namun ruang lingkup kajian bersifat nasional karena isu yang dianalisis merepresentasikan dinamika kebijakan industri otomotif lintas negara yang berkaitan pada konfigurasi isu nasional.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kebijakan industri kendaraan listrik Tiongkok (*Green Policy*) sebagai instrumen strategi ekonomi negara yang dianalisis dalam konteks implikasi geoekonomi terhadap pasar otomotif Indonesia. Unit analisis penelitian berfokus pada kebijakan negara, khususnya *Green Policy* Tiongkok di sektor kendaraan listrik, sedangkan unit observasi mencakup ekspansi perusahaan kendaraan listrik Tiongkok di, perkembangan pasar kendaraan listrik Indonesia, serta dinamika kompetisi industri otomotif nasional. Penetapan subjek penelitian ini bertujuan memastikan bahwa analisis berfokus pada hubungan antara kebijakan negara dan perubahan struktur persaingan geoekonomi yang dihasilkan. Dalam kerangka tersebut, penelitian melibatkan aktor dan entitas yang relevan, yaitu negara Tiongkok sebagai pembentuk kebijakan industri, pemerintah Indonesia sebagai regulator pasar domestik, industri kendaraan listrik sebagai pelaksana kebijakan, serta pasar otomotif Indonesia sebagai ruang manifestasi kompetisi geoekonomi. Pemilihan data dilakukan secara purposif terhadap dokumen dan

sumber informasi yang memiliki relevansi langsung dengan kebijakan industri kendaraan listrik dan dinamika persaingan geoekonomi periode 2022–2024, dengan mempertimbangkan legitimasi institusional sumber, keterkaitan substantif dengan variabel penelitian, serta kontribusinya dalam menjelaskan hubungan antara *Green Policy* dan perubahan struktur pasar otomotif Indonesia.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang diperkuat oleh integrasi data kuantitatif sekunder untuk mendukung analisis tren secara lebih empiris. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari tinjauan dokumen kebijakan industri kendaraan listrik serta berbagai regulasi fiskal dan sektoral yang relevan. Selain itu, guna memperdalam analisis dinamika pasar, menggunakan laporan industri otomotif, statistik penjualan kendaraan listrik nasional, serta laporan berkala dari institusi internasional dan nasional yang kredibel. Data tersebut kemudian disintesis dengan berbagai publikasi akademik bereputasi untuk memastikan validitas argumen dan ketajaman analisis dalam memetakan pergeseran struktur pasar otomotif di Indonesia.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur otoritatif. Data utama bersumber dari dokumen resmi pemerintah Tiongkok dan Indonesia, serta laporan berkala dari lembaga internasional seperti *International Energy Agency* (IEA), World Bank, dan *ASEAN reports*. Guna mempertajam analisis sektoral, penulis juga menghimpun data dari laporan industri, asosiasi otomotif, dan data empiris pameran otomotif seperti *Gaikindo Indonesia International Auto Show* (GIIAS). Seluruh data tersebut kemudian disintesis dengan publikasi akademik berupa jurnal ilmiah, buku, serta artikel kebijakan dan laporan riset industri kendaraan listrik yang relevan. Penggunaan ragam sumber ini ditujukan untuk melakukan triangulasi informasi, sehingga validitas analisis dalam memetakan dinamika geoekonomi otomotif dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *qualitative explanatory analysis* dengan pendekatan *analytical framework* dalam perspektif ekonomi politik internasional. Pendekatan ini bertujuan menjelaskan hubungan antara kebijakan industri kendaraan listrik Tiongkok *Green Policy*, ekspansi perusahaan otomotif, dan perubahan struktur pasar otomotif Indonesia.

Analisis dilakukan melalui tiga strategi utama. Pertama, *policy tracing* digunakan untuk menelusuri perkembangan kebijakan industri kendaraan listrik Tiongkok serta instrumen intervensi ekonomi yang digunakan negara secara kronologis. Kedua, *pattern matching* digunakan untuk mencocokkan pola antara arah kebijakan negara, ekspansi industri kendaraan listrik, dan perubahan dinamika kompetisi pasar Indonesia guna mengidentifikasi hubungan kausal yang muncul. Ketiga, *analytical temporal comparison* digunakan untuk membaca perubahan struktur pasar secara longitudinal pada periode 2022–2024 berdasarkan indikator empiris seperti perkembangan pangsa pasar dan dinamika kompetisi industri.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur sistematis, dengan menempatkan dokumen kebijakan, laporan industri, data statistik, dan publikasi akademik sebagai representasi preferensi strategis negara. Pemilihan data dilakukan secara purposif berdasarkan legitimasi institusional sumber, relevansi terhadap variabel penelitian, serta keterkaitan langsung dengan dinamika persaingan geoekonomi kendaraan listrik di Indonesia.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kombinasi *content analysis* dan *comparative analytical framework*. *Content analysis* digunakan sebagai teknik utama untuk mengidentifikasi pola, narasi kebijakan, serta orientasi strategis yang terkandung dalam dokumen kebijakan kendaraan listrik Tiongkok dan Indonesia. Teknik ini memungkinkan peneliti melakukan penafsiran sistematis terhadap teks kebijakan guna menghasilkan inferensi yang valid mengenai preferensi dan strategi ekonomi negara (Krippendorff, 2018). Sementara itu, *comparative analytical framework* digunakan

untuk membandingkan implikasi kebijakan terhadap perubahan struktur persaingan pasar otomotif Indonesia dalam perspektif geoekonomi.

Proses analisis dilakukan secara bertahap dan sistematis mengikuti prinsip analisis data kualitatif. Tahap pertama adalah reduksi data melalui identifikasi dan seleksi dokumen kebijakan, laporan industri, serta data pasar yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua merupakan proses kategorisasi dan *unitizing*, yaitu pengelompokan informasi berdasarkan tema analitis yang meliputi tujuan kebijakan, instrumen ekonomi, serta orientasi strategi industrial negara. Tahap ketiga adalah *coding* tematik dengan menggunakan konsep *Green Policy economy* dan geoekonomi sebagai kerangka interpretasi untuk mengidentifikasi hubungan antara kebijakan negara dan dinamika kompetisi industri. Tahapan ini sejalan dengan model analisis data kualitatif yang menekankan proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

Tahap selanjutnya adalah analisis komparatif untuk menilai bagaimana kebijakan industri kendaraan listrik Tiongkok berimplikasi terhadap perubahan konfigurasi persaingan di pasar otomotif Indonesia. Analisis dilakukan dengan membandingkan perkembangan kebijakan dengan indikator empiris pasar, seperti ekspansi perusahaan kendaraan listrik, perubahan pangsa pasar, serta dinamika kompetisi industri otomotif nasional. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena empiris, tetapi juga menjelaskan hubungan kausal antara kebijakan negara dan implikasi geoekonomi yang dihasilkan.

Interpretasi data dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris ke dalam kerangka ekonomi politik internasional guna menghasilkan penjelasan eksplanatif mengenai peran *Green Policy* dalam membentuk pola persaingan industri kendaraan listrik di Indonesia. Analisis dilakukan secara longitudinal dengan membaca tren perkembangan pasar kendaraan listrik pada periode 2022–2024 untuk memahami perubahan struktur kompetisi secara temporal. Proses interpretasi ini mengikuti pendekatan analisis kualitatif interpretatif yang menekankan integrasi antara data empiris dan kerangka konseptual.

1.8.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Dalam penelitian kualitatif ini, kualitas data dijaga melalui penerapan *goodness criteria* yang meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. *Credibility* dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai data sekunder seperti jurnal akademik, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan pemerintah, laporan industri otomotif, serta publikasi resmi perusahaan untuk memastikan konsistensi informasi yang digunakan. *Transferability* diwujudkan dengan penyajian deskripsi yang jelas mengenai konteks penelitian, khususnya terkait kebijakan industri kendaraan listrik Tiongkok, dinamika investasi perusahaan otomotif di Indonesia, serta perubahan struktur pasar kendaraan listrik pada periode 2022–2024 sehingga temuan penelitian dapat dipahami relevansinya dalam konteks yang serupa. *Dependability* dijaga melalui penyusunan proses penelitian secara sistematis, mulai dari pengumpulan data, proses *coding*, hingga analisis tematik yang menggunakan kerangka geoekonomi dan neomerkantilisme. Sementara itu, *confirmability* dilakukan dengan memastikan bahwa setiap interpretasi dan temuan penelitian didasarkan pada sumber data yang dapat diverifikasi, seperti laporan industri, data penjualan otomotif, dokumen kebijakan, serta publikasi akademik yang relevan. Melalui penerapan keempat kriteria tersebut, penelitian ini berupaya menjaga keabsahan data dan menghasilkan analisis yang objektif mengenai implikasi *Green Policy* Tiongkok terhadap dinamika persaingan geoekonomi otomotif di pasar Indonesia.